

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESA WISATA DALAM MEWUJUDKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI DESA SIDOMULYO

Qalbiy Sinta Arifta<sup>1</sup> & Itok Wicaksono<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Jember

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Juli 2024

Revised Juli 2024

Accepted Juli 2024

Available online Juli 2024

[sintaqalby@gmail.com](mailto:sintaqalby@gmail.com),

[itokwicaksono@unmuhje](mailto:itokwicaksono@unmuhje)

[mber.ac.id](http://mber.ac.id)

[\\*sintaqalby@gmail.com](mailto:*sintaqalby@gmail.com)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

### Abstrak

Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan program desa wisata Desa Sidomulyo dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Dalam penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif, dengan didukung data primer yang bersumber dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan situs-situs resmi pemerintahan. Setelah pencarian data, data-data tersebut melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, dengan mengacu pada indikator-indikator keberhasilan implementasi menurut Goerge III Edward, kebijakan program desa wisata di Desa Sidomulyo sudah terimplementasikan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan indikator implemetasi Goerge III Edward diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang terlihat dalam pengimplementasian program desa wisata tersbut. Namun, tetap perlu adanya peningkatan dan evaluasi terus menerus oleh pemerintah desa terkait pengimplementasian pada program desa wisata, khususnya pada indiaktor struktur birokrasi Sehingga, program desa wisata dapat terasa manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat Desa Sidomulyo.

**Kata kunci:** Implementasi, Kebijakan, Program Desa Wisata.

### Abstrct

The purpose of this research is to find out how the Sidomulyo Village tourism village program policy is implemented in realizing sustainable tourism. In this research, descriptive qualitative methods were applied, supported by primary data sourced from the interview process, observation and documentation. Apart from that, this research is also supported by secondary data sourced from books, journals, previous research and official government websites. After searching for data, the data goes through a process of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the research results obtained, with reference to indicators of successful implementation according to Goerge III Edward, the tourism village program policy in Sidomulyo Village has been implemented well. This is demonstrated by George III Edward's implementation indicators, including communication, resources, disposition and bureaucratic structure which are seen in the implementation of the tourism village program. However, there is still a need for continuous improvement and evaluation by the village government regarding the implementation of the tourism village program, especially on bureaucratic structure indicators so that the tourism village program can benefit maximally by the people of Sidomulyo Village.

**Kata Kunci:** implementation, policy, tourism village program

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan banyak keanekaragaman alam serta hayati yang tidak diragukan lagi. Maka, tidak heran hal ini menjadikan industri pariwisata menjadi sektor yang dapat mendorong ekonomi masyarakat dan negara secara keseluruhan dan berkembang pesat di berbagai negara ((Djabbari, Amran, & Sagumi, 2023). Karena, melalui potensi alam, budaya, makanan, yang banyak ini, dapat memikat wisatawan dalam negeri maupun manca negara untuk berwisata di Indonesia. Sehingga, industri pariwisata ini perlu mendapatkan perhatian khusus untuk dikembangkan, karena hal ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam segi ekonomi. Oleh karena itu, dalam mengembangkan industri pariwisata, diperlukan perhatian khusus oleh pemerintah baik, pemerintah pusat, daerah, dan desa. Karena pengembangan industri wisata memerlukan pembangunan infrastruktur yang baik hingga pemberdayaan masyarakat, sehingga dalam hal ini diperlukan peran besar dari pemerintah.

Desa Sidomulyo, yang terletak di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, menjadi salah satu desa yang memiliki potensi wisata yang luar biasa melalui potensi alam, budaya, hingga manusia yang beragam. Maka, tidak heran potensi tersebut coba dikembangkan oleh pemerintah desa melalui program desa wisata, yang memanfaatkan berbagai keunikan Desa Sidomulyo untuk menjadi destinasi wisata menarik untuk dikunjungi para wisatawan (Radar Digital, 2023). Program desa wisata diperkuat dengan adanya peraturan desa yang dibentuk yakni Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Program Desa Wisata Sidomulyo, dimana Perdes ini adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam menjalankan program desa wisata. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, saat ini terdapat dua jenis wisata yang terdapat di Sidomulyo, yakni wisata edukasi dan wisata alam. Wisata edukasi terdiri atas wisata batik, wisata kopi, dan wisata rumah akar. Sedangkan, pada wisata alam, terdapat wisata sendang tirta, wisata hutan pinus, dan wisata PPG Sidomulyo.

Program desa wisata di Desa Sidomulyo ini telah berjalan kurang lebih selama dua tahun, sejak masa kepemimpinan Kepala Desa Kamiludin, S.Kep,Ners. Tentu, program desa wisata itu masih sangat awal, untuk memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Namun pada 2023 program desa wisata Desa Sidomulyo ini, menjadi satu-satunya desa wisata di Kabupaten Jember yang masuk 45 Besar dalam ajang Desa Wisata Nusantara 2023 yang diumumkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) (Ayuningtyas, 2023). Artinya, hal ini menjadi keseriusan pemerintah desa dalam mengembangkan program desa wisata ini, meskipun program ini masih tergolong baru. Oleh karena itu, program ini perlu untuk terus dikembangkan dan dijalankan secara efektif serta efisien. Sehingga, program ini dapat memberikan kebermanfaatan yang semakin besar bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat Desa Sidomulyo.

Seperti yang telah dijelaskan program desa wisata dibentuk untuk mengembangkan potensi lokal desa menjadi industri wisata. Tujuannya adalah untuk memberikan dampak bagi masyarakat, khususnya dampak ekonomi. Maka, program desa wisata perlu dijalankan dengan baik serta berkelanjutan, sehingga dampak yang dihasilkan jauh lebih besar dan terus dapat diraskan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan definisi pembangunan pariwisata berkelanjutan yakni pembangunan yang memperhatikan faktor-faktor yang berdampak baik pada jangka panjang, dan tidak keluar dari prinsip-prinsip ekonomi, sosial, lingkungan yang baik (Obot & Setiawan, 2017).

Oleh karena itu, diperlukan peninjauan terkait implementasi kebijakan pada program desa wisata. Hal ini untuk melihat, apakah program desa wisata telah berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Maka, peneliti tertarik untuk menelaah lebih jauh terkait "Implementasi Kebijakan Desa Wisata Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan Di Desa Sidomulyo". Sehingga, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pedoman terkait apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan pada program desa wisata itu sendiri di Desa Sidomulyo.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kebijakan.

Kebijakan diartikan oleh Anderson (1984) sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Artinya, kebijakan adalah sistem yang dibuat secara sengaja oleh pembuat kebijakan, sebagai usaha mencapai tujuan tertentu yang ingin dicapai (Sidari, 2015). Dijelaskan lebih lanjut, tujuan tersebut sangat berkaitan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Artinya, kebijakan juga sebagai solusi dalam penyelesaian suatu permasalahan. Selain itu, kebijakan yang telah ditetapkan akan diikuti dan dilaksanakan, yang dapat dikatakan sebagai bentuk adaptasi oleh sasaran kebijakan yaitu seseorang aktor atau sekelompok aktor.

Sejalan dengan pengertian kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dijelaskan bahwa kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud dalam usaha mencapai sasaran. Dapat dilihat bahwa kebijakan yang telah ditetapkan menjadi panduan dalam mencapai sasaran atau tujuan. Namun, tujuan dapat tercapai bergantung pada isi kebijakan tersebut dan bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut oleh aktor-aktor yang terlibat. Maka dari itu, kebijakan perlu dibuat dengan seksama dan memperhatikan efektifitas dalam pelaksanaannya. Sehingga, tujuan atau sasaran yang diinginkan dapat terealisasi dengan baik.

### Implementasi kebijakan.

Implementasi Kebijakan merupakan salah satu tahap dari suatu rangkaian proses kebijakan. Implementasi kebijakan mengarah pada suatu tindakan yang selaras dengan maksud atau tujuan kebijakan. Artinya, implementasi kebijakan merupakan proses aktualisasi cara-cara kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selaras dengan pengertian menurut van Metter & van Horn (1975:65) yang mengartikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Agustino, 2020). Dapat dikatakan, implementasi kebijakan sangat krusial dalam proses kebijakan. Karena, implementasi yang buruk dapat berdampak pada tidak tercapainya tujuan kebijakan. Sehingga, dibutuhkan implementasi kebijakan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil atau tidak, bergantung pada kelengkapan variabel-variabel yang terdapat dalam proses implementasi. Jika variabel-variabel tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka proses implementasi dapat terhambat. Sehingga, mengganggu pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat secara luas. Goerge C Edward III yang menamakan model implementasinya sebagai *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Mengatakan terdapat empat variabel penentu proses implementasi dapat dikatakan berhasil atau tidak. Artinya, jika variabel-variabel tersebut dapat terpenuhi dengan baik, maka proses implementasi dapat dikatakan berhasil. Empat variabel yang diuraikan oleh Goerge C Edward III diantaranya:

#### **Komunikasi**

Komunikasi adalah salah satu variabel penentu keberhasilan implementasi kebijakan menurut Goerge C Edward III. Dalam mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan, tentu dibutuhkan proses implementasi yang efektif. Implementasi kebijakan yang baik dan berhasil, dapat tercapai salah satunya dengan adanya komunikasi antar aktor atau pelaku kebijakan yang baik pula. Karena, dengan adanya komunikasi yang baik, maksud atau konten kebijakan dapat dimengerti dengan jelas.

Lebih dalam dijelaskan, terdapat indikator yang dapat mengukur variabel komunikasi dalam implementasi. Pertama, dibutuhkan transmisi yang baik atau penyaluran informasi yang tidak terdistorsi, pada saat komunikasi berlangsung pada tingkatan birokrasi. Kedua, yaitu

dibutuhkan kejelasan atau tidak ambigu pada informasi yang diberikan kepada para pelaksana kebijakan. Ketiga, indikator konsistensi atau komunikasi yang berlangsung pada tingkatan birokrasi dapat menerima informasi yang sama. Maka dapat disimpulkan, variabel komunikasi yang terjadi pada tingkatan birokrasi akan menentukan kebijakan dapat diimplementasikan sesuai konten atau isi kebijakan. Karena, jika komunikasi berjalan buruk, dapat menyebabkan misinformasi dan berakibat tidak berjalannya implementasi kebijakan sesuai isi kebijakan itu sendiri.

### **Sumber daya**

Dalam model implementasi Goerge C Edward III. Terdapat beberapa indikator yang mengukur sumber daya telah terpenuhi dengan baik atau tidak. Pertama, terkait sumber daya manusia yang tersedia, dimana dibutuhkan sumber daya yang mencukupi dan kompeten dalam bidangnya pada proses menjalankan kebijakan. Kedua, yaitu informasi penuh yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan informasi terkait kepatuhan para pelaksana dalam menaati isi kebijakan yang ditetapkan. Ketiga, indikator wewenang yang digunakan secara benar dan amanah oleh para pelaksana dalam menjalankan kebijakan, hal tersebut sebagai legitimasi atau kepercayaan masyarakat kepada para pelaksana kebijakan. Terakhir, adanya fasilitas sarana dan prasarana penunjang yang terpenuhi dalam implementasi kebijakan, tanpa adanya fasilitas dapat mengurangi optimalisasi sumber daya manusia yang tersedia sekalipun telah mencukupi dan kompeten pada bidangnya. Hal ini menjadi sesuatu yang penting dalam implementasi kebijakan, khususnya jika dihubungkan dalam implementasi desa wisata.

### **Disposisi**

Variabel ketiga penentu efektifitas implementasi kebijakan adalah disposisi atau sikap para pelaksana. Dalam variabel disposisi, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, efek disposisi yang dapat memunculkan hambatan-hambatan atas dasar sikap para pelaksana tidak mengikuti maksud dan konten kebijakan, tentunya hal ini dapat berdampak pada implementasi kebijakan yang kurang baik. Kedua, yaitu melakukan pengaturan birokrasi, hal ini menjadi perlu karena adanya efek yang negatif dari efek disposisi, sehingga dibutuhkan pengaturan dengan membuat tata kelola yang baik pada saat penunjukan atau pengangkatan staf pada birokrasi. Ketiga, yaitu insentif atau manajemen terkait pembiayaan terhadap tugas staf, artinya insentif yang akan diberikan harus sesuai tugas dan fungsi yang didapatkan oleh masing-masing para pelaksana, sehingga dapat menjadi pendorong bagi para pelaksana dalam menjalankan implementasi kebijakan dengan baik. Maka dari itu, disposisi juga memiliki peran yang penting dalam proses implementasi kebijakan. Karena, efek disposisi yang semakin meluas menyebabkan hambatan-hambatan semakin besar pula. Sehingga, diperlukan tata kelola yang tepat terhadap pengaturan para pelaksana. Untuk mendapatkan para pelaksana yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas pada saat mengemban tugas yang telah diberikan.

### **Struktur Birokrasi**

Dalam variabel struktur birokrasi, terdapat dua hal yang menjadi faktor pendorong atau indikator keberhasilan dalam variabel struktur birokrasi. Pertama, adanya *Standar Operating Procedures* (SOPs) atau penetapan prosedur sebagai dasar dan standar para pelaksana untuk menjalankan kebijakan, sehingga memunculkan rasa disiplin dan keteraturan. Kedua, yaitu melakukan fragmentasi pada struktur birokrasi, yang mengarah pada pembagian unit-unit kerja sesuai bidang keahlian dan kapasitas yang dimiliki masing-masing para pelaksana. Dengan adanya *Standar Operating Procedures* (SOPs) dan fragmentasi dapat membuat sistem berjalan lebih efektif sesuai dengan tujuan kebijakan. Maka dari itu, pembuatan SOPs dalam struktur birokrasi juga perlu pemahasan secara matang, sehingga standar yang telah dibuat sesuai dengan isi kebijakan dan membuat implementasi kebijakan efektif. Sama halnya dengan fragmentasi struktur birokrasi, fragmentasi juga harus berlandaskan perencanaan yang matang.

## **METODOLOGI**

Pada penelitian ini, digunakan jenis metode yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Menurut sugiyono (2012:13) penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk mengetahui nilai suatu variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, ataupun menghubungkan dengan variabel yang lain (Krisnan, 2022). Dapat diartikan peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan:

### **Fokus Penelitian**

Fokus pada penelitian ini adalah menganalisis terkait implementasi menurut teori Goerge Edward III pada kebijakan desa wisata dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di desa sidomulyo. Menurut teori Goerge Edward terdapat empat indikator dalam teori implementasi yakni diantaranya, komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Sehingga, empat indikator tersebut yang akan digunakan peneliti untuk analisis proses implementasi dari program desa wisata di Desa Sidomulyo.

### **Jenis dan Pengumpulan Data.**

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu jenis data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses wawancara dilakukan pada bersama Kepala Desa Sidomulyo, Anggota BUMDes Sidomulyo, Pengelola Destinasi Wisata Edukasi Kopi, hingga masyarakat sebagai sasaran program desa wisata Sedangkan, proses observasi dilakukan dengan melihat langsung implementasi program desa wisata yang dijalankan di Desa Sidomulyo itu sendiri. Terakhir, proses dokumentasi dilakukan dengan mendapatkan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, peneliti juga menggunakan jenis data sekunder pada penelitiannya. Data sekunder ini dikumpulkan melalui proses studi pustaka atau literatur. Studi pustaka tersebut diperoleh dari buku, jurnal, artikel, laporan, atau situ-situs resmi dari pemerintahan.

### **Analisis Data.**

Jenis-jenis data yang telah didapatkan tersebut, selanjutnya melalui proses analisis data, dimana terdapat beberapa tahap dalam proses analisis data. Pertama adalah tahap reduksi data, data yang telah dikumpulkan akan disesuaikan dengan fokus penelitian, sehingga didapatkan data yang benar-benar relevan dengan fokus penelitian. Kedua yaitu penyajian data, data yang telah direduksi saling dihubungkan satu sama lain dan disajikan. Terakhir, peneliti dapat melakukan penarikan kesimpulan dari hasil reduksi dan penyajian data yang menjawab fokus dan rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti. Sehingga, didapatkan hasil sesuai dengan fokus dan rumusan masalah dengan data-data yang relevan dan menyeluruh yang telah dihasilkan dari proses pengumpulan data dan informan yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Program Desa Wisata**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, program desa wisata dibentuk untuk memaksimalkan potensi alam hingga budaya, untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya bagi masyarakat Desa Sidomulyo. Saat ini, terdapat dua jenis wisata, yakni wisata alam dan edukasi. Berikut adalah gambaran dua wisata unggulan dari Desa Sidomulyo, yakni wisata edukasi rumah akar dan rumah batik:



**Gambar 1.** Wisata Akar dan Wisata Batik Desa Sidomulyo

Wisata alam, adalah wisata yang menegdepankan potensi alam Desa Sidomulyo untuk dijadikan destinasi wisata. Sedangkan, wisata edukasi merupakan destinasi wisata yang mengedepankan potensi budaya masyarakat di Desa Sidomulyo itu sendiri, salah satunya yang dapat dilihat pada gambar di atas, dimana wisata akar dan batik adalah hasil kreativitas para masyarakat Desa Sidomulyo yang memanfaatkan potensi alam dan hayati yang ada di sekitar mereka hingga bernilai jual dan dapat dijadikan destinasi wisata yang diminati oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat dari luar Desa Sidomulyo itu sendiri. Maka, tidak heran program desa wisata ini menjadi program yang penting untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Karena, hal ini akan menjadikan branding Desa Sidomulyo semakin dikenal oleh masyarakat luar dan berdampak secara ekonomi bagi masyarakat Desa Sidomulyo itu sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Tyas selaku anggota BUMDes yang terlibat dalam pengelolaan program desa wisata di Desa Sidomulyo:

*“Program desa wisata ini masih baru mba, program ini dibentuk untuk mengenalkan indahnya Desa Sidomulyo ini. Kami punya beberapa wisata unggulan yakni wisata alam dan wisata edukasi, dimana kami juga menawarkan paket wisata dengan harga lebih terjangkau bagi para wisatawan” (Wawancara, September 2023).*

Program Desa Wisata ini telah memenangkan banyak penghargaan meskipun terbilang cukup baru salah satunya desa wisata yang masuk dalam 45 Besar pada ajang Desa Wisata Nusantara 2023 yang diumumkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) (Ayuningtyas, 2023). Maka tidak heran, program ini terus coba dikembangkan oleh Pemerintah Desa Sidomulyo, serta dikuatkan peran dari pihak luar yang dikolaborasikan dalam implementasi program desa wisata, contohnya perguruan tinggi, BUMN, hingga pihak swasta lainnya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Sidomulyo yakni Bapak Kamiludin, S.Kep.Ners yang menyatakan:

*“Alhamdulillah, dalam perjalanan program desa wisata ini, kami mendapatkan beberapa penghargaan hingga taraf nasional. Tentunya, hal ini memperkuat semangat kami untuk mengembangkan program desa wisata. Melalui penghargaan-penghargaan yang telah kami dapat, meningkatkan kami bahwa potensi wisata Desa Sidomulyo tidak kalah menarik” (Wawancara, September 2023).*

## Implementasi Program Desa Wisata

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti menggunakan indikator pada implementasi Goerge Edward III dalam menganalisis implemntasi program desa wisata. Berikut hasil analisis peneliti pada implementasi program desa wisata dalam mewujudkan wisata yang berkelanjutan:

### *Komunikasi*

Indikator pertama adalah komunikasi Komunikasi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya komunikasi adalah salah satu variabel penentu keberhasilan implementasi kebijakan menurut Goerge C Edward III. Dalam mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan, tentu dibutuhkan proses implementasi yang efektif. Implementasi kebijakan yang baik dan berhasil, dapat tercapai salah satunya dengan adanya komunikasi antar aktor atau pelaku kebijakan yang baik pula. Karena, dengan adanya komunikasi yang baik, maksud atau konten kebijakan dapat dimengerti dengan jelas. Pada program desa wisata, komunikasi sudah berjalan dengan cukup jelas, dimana hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan desa terkait program desa wisata, yang menjadikan dasar setiap pihak dalam menjalankan program desa wisata itu sendiri. Selain itu, dilakukan Focus Group Discussion (FGD) antar pihak untuk mengevaluasi implementasi program. Dapat diartikan, komunikasi masih berjalan cukup baik dalam program desa wisata.

### *Sumber Daya*

Sumber Daya berkaitan dengan pertama, terkait sumber daya manusia yang tersedia, dimana dibutuhkan sumber daya yang mencukupi dan kompeten dalam bidangnya pada proses menjalankan kebijakan. Kedua, yaitu informasi penuh yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan informasi terkait kepatuhan para pelaksana dalam menaati isi kebijakan yang ditetapkan. Ketiga, indikator wewenang yang digunakan secara benar dan amanah oleh para pelaksana dalam menjalankan kebijakan, hal tersebut sebagai legiitimasi atau kepercayaan masyarakat kepada para pelaksana kebijakan. Terakhir, adanya fasilitas sarana dan prasarana penunjang yang terpenuhi dalam implentasi kebijakan, tanpa adanya fasilitas dapat mengurangi optimalisasi sumber daya manusia yang tersedia sekalipun telah mencukupi dan kompeten pada bidangnya.

Pada program desa wisata, sumber daya manusia tergambar dengan adanya pihak BUMDes yang bertanggung jawab dalam implementasi program, ditambah dengan KIM (Kelompok Informasi masyarakat) Desa Sidomulyo yang juga ikut dalam membantu dalam pelaksanaan progam desa wisata. Lalu, informasi dan wewenang dapat terlihat dengan adanya pembentukan peraturan desa yang jelas, dimana telah dibeda-bedakan fokus kerja dari masing masing pihak dan wewenangnya. Terakhir, sarana dan prasarana yang terlihat melalui RKPDes yang dialokasikan untuk program desa wisata untuk mengembangkan infrastruktur dari program desa wisata. Artinya, sumber daya pada program desa wisata cukup terlihat baik dan terpenuhi

### *Disposisi*

Dalam variabel disposisi terdapat dua indikator yang perlu diperhatikan yaitu terkait pengangkatan birokrat dan insentif bagi para pelaksana kebijakan. Pertama, terkait pengangkatan birokrat telah diatur dalam peraturan desa yang telah dibentuk oleh Pemerintah Desa, begitupun sistem ketika berkolaborasi dengan pihak lain. Kedua, terkait insentif, seperti yang telah dijelaskan, program desa wisata dijalankan melalui APBDes yang dialokasikan secara khusus dalam menjalankan program desa wisata, selain itu terdapat insetif juga dari pihak-pihak yang berkolaborasi dengan pemerintah desa dalam menjalankan program desa wisata tersebut. Sehingga, dalam hal disposisi program desa wisata cukup berjalan dengan baik dan telah diatur sedemikian baik untu efektifitas implementasi program yang baik.

### *Struktur Birokrasi*

Variabel yang terakhir adaah struktur birokrasi, dimana dalam variabel ini terdapat dua indikator diantaranya *Standar Operating Procedurs* (SOPs) dan fragmentasi. Sayangnya, pada program desa wisata, meskipun telah dibarengi peraturan desa, namun beluma ada *Standar*

*Operating Procedures (SOPs)* yang jelas, sehingga hal ini menimbulkan hasil kerja yang tidak efektif. Terakhir, terkait fragmentasi, dimana pada program desa wisata setiap pihak telah pihak telah dibagi sesuai dengan fokus kerjanya masing-masing, sehingga lebih memudahkan dalam hal koordinasi. Dapat disimpulkan, dalam struktur birokrasi ini sudah berjalan cukup baik.

## KESIMPULAN

Proses suatu implementasi kebijakan perlu diukur keberhasilannya sebagai bahan evaluasi pemerintah terhadap suatu kebijakan baik lingkup desa maupun pusat. Proses implementasi tersebut dapat diukur melalui beberapa variabel, dimana menurut Goerge Edward III variabel tersebut diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Program desa wisata, adalah program yang dibentuk untuk mengembangkan potensi lokal desa dan dapat berdampak secara ekonomi bagi masyarakat Desa Sidomulyo itu sendiri. Diharapkan bahwa, program desa wisata ini berjalan dengan baik, jika dinilai melalui indikator Goerge Erdward III. Namun, perlu ada yang diperhatikan pada indikator struktur birokrasi, yakni *Standar Operating Procedures (SOPs)*, dimana perlu dibuatkan *SOPs* bagi setiap pihak yang terlibat secara detail, sehingga implementasi dapat jauh lebih efektif.

## DAFTAR REFERENSI

### Peraturan

Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Program Desa Wisata Sidomulyo

### Buku

Agustino, L. (2020), *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2* (p. 234). Bandung: Alfabeta.

### Website

Ayuningtyas, D. (2023, Oktober 31). *Jember Bangga! Sidomulyo Satu-satunya Desa Wisata di Jember yang Masuk 45 Besar Desa Wisata Nusantara 2023*. Retrieved from KIM Tirto Gunitir Desa Sidomulyo : <https://tirto-gunitir.kim.id/berita/read/jember-bangga-sidomulyo-satu-satuny5499-350930200901>

Krisnan. (2022, Juli 3). *8 Pengertian Penelitian Deskriptif Menurut Para Ahli*. Retrieved from menta.net: <https://meenta.net/pengertian-penelitian-deskriptif/>

Radar Digital. (2023, Agustus Rabu). *Desa Sidomulyo Jember Miliki Banyak Wisata Menarik yang Wajib Kamu Kunjungi*. Retrieved from Radar Digital: <https://radarjember.jawapos.com/jember/792892963/desa-sidomulyo-jember-miliki-banyak-wisata-menarik-yang-wajib-kamu-kunjungi>

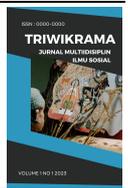
Sidari, C. (2015, 04 27). *Pengertian Kebijakan Menurut Para Ahli*. Retrieved from [www.kumpulanpengertian.com](http://www.kumpulanpengertian.com): <https://www.kumpulanpengertian.com/2015/04/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.html>

### Jurnal

Obot, F., & Setiawan, D. (2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu Dalam Mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 113-120.

Djabbari, M. H., Amran, K., & Sagumi, D. S. (2023). Collaborative Governance: Trust Buliding Indicator Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Mendatte Park di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Administrasi Publik*, 262-275

Nurdiassa, A., Zulfikar, A., Rasyid, F., & Wulandari, A. T. (2021). Implementasi Kebijakan Smart City dalam Mewujudkan Makassar Kota Dunia Smart City Policy Implementation in Realizing Makassar a World City. *Journal of Public Administration and Government*, 3, 37-46.



- Rahmadanita, A., Santoso, B., & Wasistiono, S. (2018). Implementasi Kebijakan Smart Government Dalam Rangka Mewujudkan Smart City Di Kota Bandung. *JURNAL ILMU PEMERINTAHAN WIDYA PRAJA*, 44(2), 81–106.
- Septiani, E. (2021). Implementasi Electronic Government Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Smart City. *Journal Administrasi Nusantara Mahasiswa*, 3(3), 72–83.
- Yaniarti Eka Pratiwi, P., Mayasari, M., & Febriantini, K. (2021). Implementasi Electronic Governance Melalui Aplikasi Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat Di Kabupaten Karawang. *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(01), 77–97.